



dprpsp

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROVINSI ACEH

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Jl. Ahmad Yani No. 39, Peunayong
Banda Aceh, Indonesia



<http://dpmptsp.acehprov.go.id>



dpmptsp.aceh@gmail.com



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh memuat hasil analisis terhadap capaian sasaran strategis dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP Aceh.

Berkaitan dengan hal tersebut analisis dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja DPMPTSP Aceh agar lebih relevan, efisien, berdampak dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita.

Banda Aceh, Februari 2020
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

Dr. Aulia Sofyan
Pembina Utama Muda
NIP.19721018 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Aspek Strategis	4
E. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis Tahun 2017 - 2022	6
B. Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Realisasi Anggaran	25
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
2. Pengukuran Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

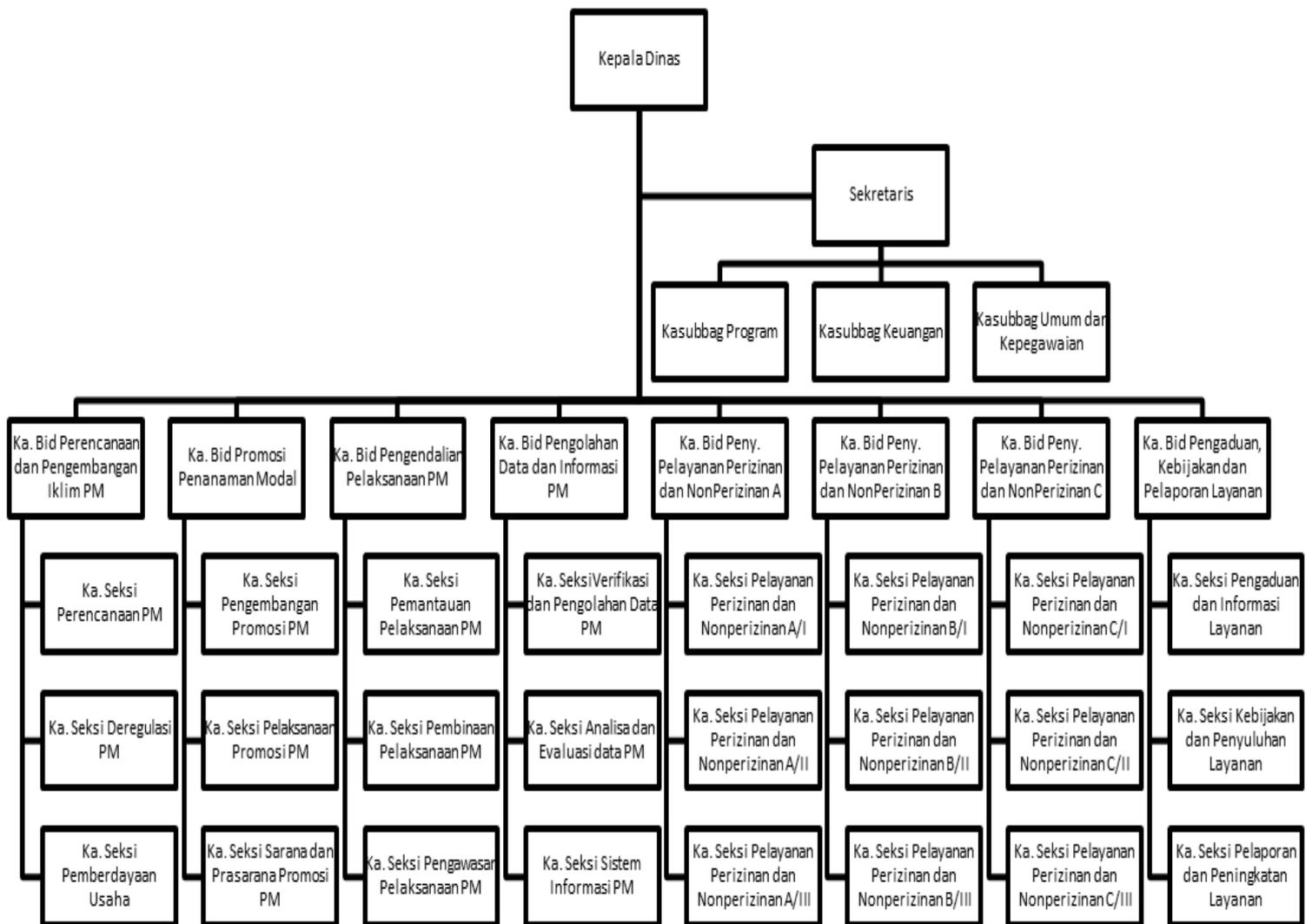
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Aceh. Laporan Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2019 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Struktur Organisasi



C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan
- d. Penyelenggaraan tugas penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan termasuk lintas kabupaten/kota
- e. Penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai sifat, jenis dan karakteristik perizinan
- f. Pengelolaan system informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses
- g. Penanganan pengaduan
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara periodic untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan

- j. Penyampaian laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Gubernur secara periodik, dan
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

D. Aspek Strategis

Masih terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam upaya perbaikan pemberian pelayanan bagi investor dan peningkatan realisasi investasi. Diantaranya adalah perbedaan regulasi dan standar pelayanan perizinan di pusat dan daerah, tumpang tindih regulasi pusat dan daerah, hambatan koordinasi lintas sektor, perubahan teknologi yang sangat cepat dan dinamis serta jumlah sumber daya manusia yang terbatas.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DPMPTSP Aceh Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5) Lampiran

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

b. Daftar Penghargaan

c. Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan kepadanya.

Visi Pembangunan Aceh Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2017 – 2022 yaitu **“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”**. Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program semua SKPA sehingga dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk memperoleh manfaat dan dampak yang dicita-citakan.

Untuk mewujudkan Visi di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh mengacu pada 2 (dua) misi dari 10 (sepuluh) misi Kepala Daerah 2017-2022 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 (lima) tahun ke depan, adapun Misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani

2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati Mazhab yang lain
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan social yang mudah, berkualitas dan terintegrasi
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan
7. Menyediakan sumber energy listrik yang bersih dan terbarukan
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industry dan industry kreatif yang kompetitif
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sedangkan 2 (dua) misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, yaitu:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani
2. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah telah dirumuskan sejumlah program yang diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, yaitu;

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, dengan hasil meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan hasil meningkatnya minat dan nilai penanaman modal (PMDN/PMA)
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan hasil tercapainya sasaran pembangunan penanaman modal

B. Perjanjian Kinerja

Diantara sasaran dan indikator kinerja di atas, terdapat sasaran yang strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. IKU ini adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh serta RPJMA Tahun 2017-2022.

Adapun Sasaran Strategis dan IKU Badan Investasi dan Promosi Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 DPMPTSP Aceh

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Investor berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA) - Jumlah Nilai investasi berskala nasional

		dan internasional (PMDN/PMA) - Rasio Daya Serap Tenaga kerja (PMDN/PMA)
2.	Meningkatnya Nilai Investasi	- Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap perizinan

Untuk tahun Anggaran 2019, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh telah menandatangani Perjanjian Kinerja sebagaimana dimuat dalam Lampiran I mengikuti Rencana Strategis 2017-2022. Isinya adalah sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 DPMPTSP Aceh

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal	- Jumlah Investor berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA) - Rasio Daya Serap Tenaga kerja - Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	670 perusahaan 1:65 Rp. 5.500.000.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	87,50

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2019

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu wujud dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun secara periodik

Pada bab ini akan menguraikan tentang perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2017-2022. Pencapaian kinerja pemerintah Aceh dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisis hasil pengukuran pencapaian setiap sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tahun 2019 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dengan realisasinya.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dari BKPM.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Penyusunan Penetapan Kinerja, Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terdiri dari:

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semaksimal baik (Progres Positif) dengan menggunakan rumus:

$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian (Progres Negatif), maka digunakan rumus:

$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{(\text{Target}) - (\text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis I: Meningkatnya Jumlah Penanam Modal

Didukung oleh Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan system informasi penanaman modal
2. Perencanaan penyusunan program dan pengendalian serta evaluasi
3. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
4. Peningkatan promosi, kerjasama investasi dan pengembangan potensi unggulan daerah
5. Peningkatan iklim penanaman modal
6. Perencanaan pengembangan penanaman modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe

Juga didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Perizinan. Selain itu, Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi juga ikut meningkatkan pencapaian *outcome* Sasaran I ini.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Tingkat Capaian	Kategori
1	Jumlah Investor/Izin berskala Nasional dan Internasional	670 Perusahaan/Izin	10 Perusahaan/Izin	1,49%	Kurang
2	Rasio daya serap tenaga kerja	1:65	1:29	44,62%	Kurang
3	Jumlah nilai realisasi investasi	5.500.000.000.000 rupiah	5.812.090.742.000 rupiah	105,67%	Sangat Baik
Rata-rata tingkat capaian				50,59%	Kurang

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Meningkatnya Jumlah Penanam Modal*” yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dapat diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **50,59%** atau dengan kategori Kurang.

Pada tahun 2019 ada beberapa indikator kinerja yang turun yaitu Jumlah Investor berskala Nasional dan Rasio daya serap tenaga kerja, namun ada juga indikator yang melebihi target yaitu Jumlah nilai realisasi investasi, dengan analisis sebagai berikut:

→ **Indikator Kinerja “*Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional*” ditargetkan 670 perusahaan namun yang dapat direalisasi sebanyak 10 perusahaan dengan tingkat capaian 1,49% atau kategori Kurang.**

Perhitungan target Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional Pada DPMPSTSP Aceh dihitung berdasarkan jumlah izin yang masuk berdasarkan

kewenangan DPMPSTSP Aceh saja yaitu izin Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) yang diterbitkan pada Aplikasi OSS tahun 2019. Ada sekitar 10 izin PMDN yang telah disetujui di system aplikasi OSS dengan jumlah nilai rencana investasi sebesar Rp. 10.890.000.000. Namun demikian jumlah perusahaan yang mendaftar di aplikasi OSS ada sekitar 2.576 perusahaan pada tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa minat terhadap investasi sangat besar di Aceh, walaupun tidak semua pendaftaran tersebut dapat disetujui. Target dari indikator ini tidak bisa dicapai dikarenakan adanya perubahan system pencatatan dan pendaftaran perizinan dari SPIPISE ke OSS yang membutuhkan penyesuaian dari system itu sendiri dan kesiapan dari SDM yang belum menguasai system yang baru.

Penetapan target di IKU sebanyak 670 perusahaan/izin PMA dan PMDN dihitung dengan asumsi semua izin yang ada di Aceh, namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh hanya dapat merekap izin yang dikeluarkan dalam kewenangan provinsi dan khusus PMDN sehingga nilai yang di dapat tidak mencakup keseluruhan izin yang ada di Aceh. Hal ini perlu dirumuskan ulang untuk penetapan target IKU ke depannya agar dapat di ukur dan dicapai.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan upaya peningkatan pendapatan Aceh bidang perizinan, telah menerbitkan dokumen izin dan non izin sebanyak 3.875 dokumen, sedangkan jumlah izin dan non izin yang diterbitkan khusus bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A sebanyak 570 dokumen, perizinan dan non perizinan B sebanyak 605 dokumen, perizinan dan non perizinan C sebanyak 2.700 dokumen.

Perlu diketahui bahwa walaupun realisasi investasi merupakan salah-satu Indikator Kinerja Utama (IKU), perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh juga mengarah pada perbaikan persepsi orang luar terhadap Aceh. Ini tentu membutuhkan waktu. Karenanya, dukungan semua pihak sangat diharapkan.

Dari tahun 2017 sampai 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh fokus menawarkan 4 sektor prioritas, yakni agro industri, energy, infrastruktur dan pariwisata. Prioritas ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. Saat ini, berbagai investasi di sektor-sektor tersebut terus dilakukan.

Promosi penanaman modal selama ini dilakukan secara langsung maupun berbasis web. Strategi langsung dilaksanakan melalui misi investasi di dalam daerah dan luar negeri, baik kegiatan pertemuan bisnis maupun pameran investasi. Untuk promosi berbasis web, DPMPTSP Aceh telah mendesain ulang tampilan web dan mengisinya dengan isi yang lebih menarik dan menyajikan informasi awal yang dibutuhkan oleh calon investor.

Tentunya dalam usaha menggaet lebih banyak calon investor diperlukan kerja sama dari semua pihak, baik yang di provinsi, kabupaten dan pusat. Perlu adanya pembenahan sumber daya manusia, menyederhanakan birokrasi dan regulasi serta membuat formulasi ekonomi sehingga target pemerintah dapat dipenuhi. Salah satu prioritas pemerintah Aceh dalam menggenjot investasi di daerah adalah melalui pengembangan kawasan industri, seperti Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, KEK Arun Lhokseumawe, Pelabuhan Perdagangan Bebas Sabang serta Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo. Aceh saat ini mempunyai empat titik strategis yang telah ditetapkan sebagai organ vital untuk memacu denyut nadi perekonomian Aceh. Ditambah beberapa titik sentra lainnya yang sedang diupayakan yaitu KEK Barat Selatan, KEK Pariwisata di Simeulue dan Pulau Banyak, serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Dataran Tinggi Gayo Alas. Sedangkan terkait dengan KEK Arun Lhokseumawe pemerintah Aceh akan terus melakukan perbaikan iklim investasi supaya menjadi lebih menarik kepada investor seperti permasalahan sewa lahan yang relatif pendek, yaitu selama lima tahun akan ditingkatkan menjadi 20 hingga 30 tahun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terus berupaya menjaring calon-calon investor agar mau menanamkan modalnya di lokasi-lokasi vital tersebut. Berbagai promosi dan program-program kerja sama terus ditingkatkan.

→ **Indikator Kinerja “Rasio Daya Serap Tenaga Kerja” ditargetkan sebanyak 1:65, namun yang dapat direalisasi sebanyak 1:29 dengan tingkat capaian 44,62% atau kategori Kurang.**

Serapan tenaga kerja pada tahun 2019 dapat dilihat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebanyak 12.995 orang dari 446 perusahaan PMA dan PMDN yang terdiri dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) diketahui sebanyak 1.192 pekerja laki-laki dan 43 pekerja perempuan dengan pekerja asing

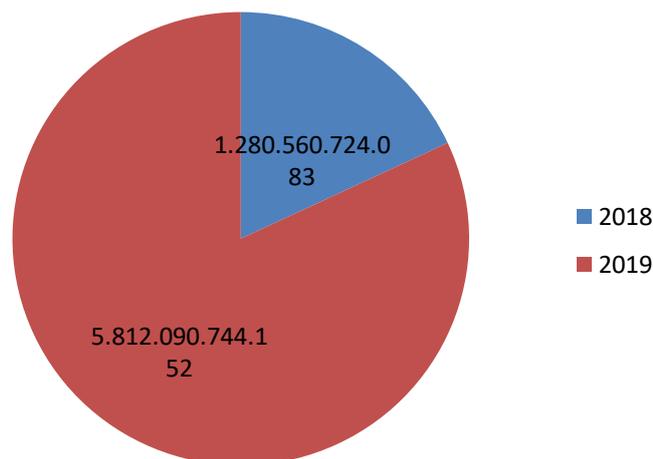
sebanyak 27 orang. Sedangkan untuk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 10.334 pekerja laki-laki dan 1.358 pekerja perempuan dan pekerja asing sebanyak 41. Sehingga didapat rasio perbandingan tenaga kerja 1:29 dengan tingkat capaian 44,62%.

Realisasi untuk Rasio Daya Serap Tenaga Kerja masih kurang dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan karena masih banyak perusahaan yang belum melaporkan jumlah tenaga kerja dengan jumlah yang sebenarnya serta masih ada perusahaan yang belum melakukan realisasi dari izin yang telah dikeluarkan dengan berbagai alasan.

→ **Indikator Kinerja “Jumlah Nilai Realisasi Investasi” ditargetkan sebanyak Rp. 5.500.000.000.000, realisasi sebanyak Rp. 5.812.090.744.152 dengan tingkat capaian 105,67% atau kategori Sangat Baik.**

Realisasi investasi pada tahun 2019 mencapai Rp. 5,8 Triliun atau 105,67%, capaian realisasi ini meningkat dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak Rp. 1,3 Triliun. Grafik peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Perbandingan Realisasi Investasi Tahun 2018 dan 2019

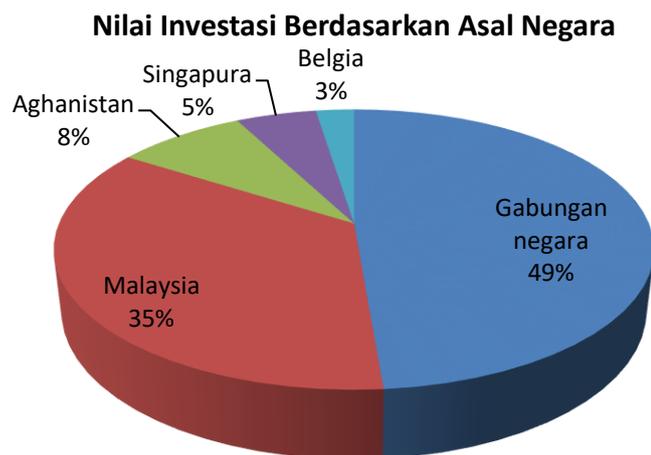


Untuk urusan investasi jangka panjang dibutuhkan waktu dan dukungan dari semua pihak, dimulai dari proses perizinan, survei, studi kelayakan, ketersediaan lahan, dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, kesiapan masyarakat menerima investasi, ketersediaan SDM dan berbagai faktor lainnya yang saling berkontribusi.

Pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal di daerah, di antaranya; penyiapan SDM, penguatan kelembagaan investasi di kabupaten/kota, melakukan deregulasi dalam perizinan investasi, memberikan insentif, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi porsi realisasi investasi di Aceh pada tahun 2019 ini. Dengan jumlah nilai realisasi investasi sebesar Rp. 4.615.149.781.752 dengan jumlah perusahaan 376 yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.196.940.962.400 dengan jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM sebanyak 70 perusahaan. Total nilai realisasi tahun 2019 ini Rp. 5.812.090.744.152 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.5.500.000.000.000 dengan capaian 105,67% melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 12.995 dengan rasio daya serap tenaga kerja adalah 1:29. Capaian realisasi investasi tiap tahun diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh.

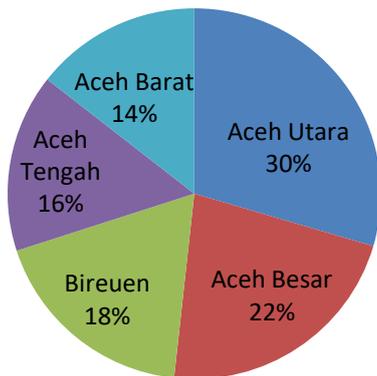
Realisasi PMA berdasarkan negara asal investor yaitu; Gabungan Negara sebesar 37,091,899 USD, Malaysia sebesar 26,921,129 USD, Afghanistan sebesar 6,327,551 USD, Singapura sebesar 3,946,072 USD, Belgia sebesar 1,876,365 USD.



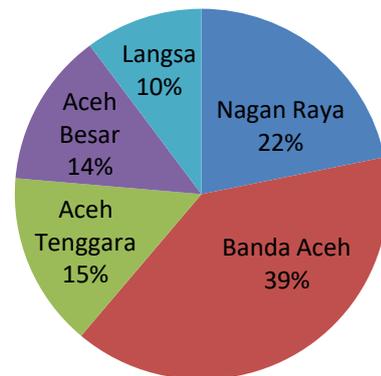
Berdasarkan lokasi, Realisasi PMA lima besar berturut-turut yaitu di Kabupaten Nagan Raya sebesar 28,40 juta USD, Kota Banda Aceh sebesar 15,75 juta USD,

Kabupaten Aceh Tenggara 10,99 juta USD, Kabupaten Aceh Besar 9,70 juta USD dan Kota Langsa 7,37 juta USD. Sedangkan PMDN yaitu di Kabupaten Aceh Utara Rp 956,61 miliar, Kabupaten Aceh Besar Rp 716,75 miliar, Kabupaten Bireuen Rp 591,77 miliar, Kabupaten Aceh Tengah Rp 503,16 miliar dan Kabupaten Aceh Barat Rp 466,71 miliar.

Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Kab/Kota



Nilai Investasi PMA Berdasarkan Kab/Kota



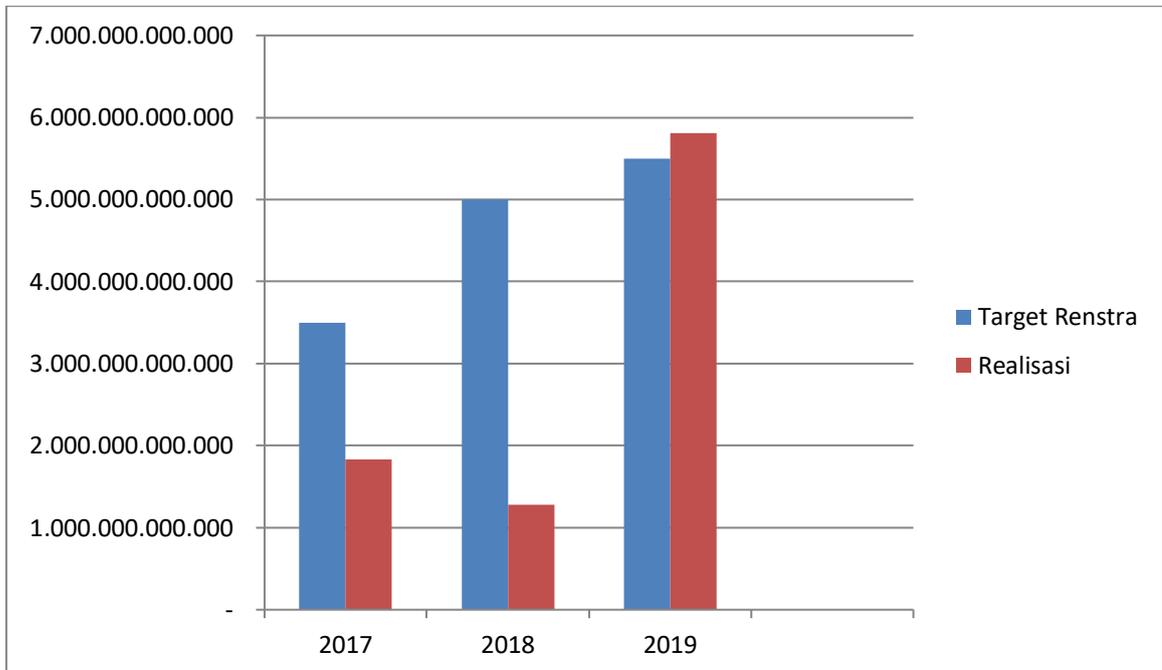
Jika ditinjau dari sektor usaha, Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha lima besar berturut-turut yaitu Listrik, gas dan air 53,15 juta USD, Transportasi, gudang dan komunikasi 14,20 juta USD, Industri kimia dan farmasi 6,33 juta USD, Tanaman pangan dan perkebunan 1,88 juta USD, dan industry makanan 1,66 juta USD. Sementara PMDN yaitu Listrik, gas dan air sebesar Rp 1,09 triliun, Tanaman pangan dan perkebunan Rp 1,02 triliun, Industri kimia dan farmasi Rp 940,61 miliar, Konstruksi Rp 458,09 miliar, dan Pertambangan Rp 386,62 miliar.

Walaupun capaian kinerja 2019 tidak semua mencapai target, iklim investasi tidak mengalami perubahan ke arah negatif. Seiring dengan itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terus melakukan pembinaan dan fasilitasi permasalahan penanaman modal melalui tim taskforce yang dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak. Beberapa perusahaan yang telah difasilitasi antara lain PT. Semen Indonesia Aceh, PT. Indonesia Pacific Energy, PT. Mega Multi Cemerlang, dan PT. KSU Tiga Manggis.

Perkembangan Realisasi Investasi dari tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut ini:

Grafik 3.1

Perkembangan Realisasi Investasi dari tahun 2017 s.d 2019



Tahun	Target Renstra	Realisasi
2017	3.498.013.000.000	1.830.049.482.995
2018	5.000.000.000.000	1.280.560.724.083
2019	5.500.000.000.000	5.812.090.744.152

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi dalam kurun 3 (tiga) tahun mengalami trend naik turun hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Banyak perusahaan yang belum patuh melaporkan LKPM secara tepat waktu dan berkesinambungan, alamat perusahaan sering berubah tapi tidak dilaporkan, dokumen perusahaan tidak tersedia di lokasi proyek, sehingga menyulitkan perolehan data dan informasi di lokasi, serta wakil perusahaan yang dihubungi masih belum semua mengetahui perkembangan realisasi

investasi perusahaannya.

- b. Perusahaan masih sedikit yang menyampaikan LKPM melalui SPIPISE, padahal sebagian sudah mendapatkan kode akses.
- c. Instansi penanaman modal Kabupaten/Kota belum melakukan koordinasi secara optimal dengan perusahaan yang berada dilokasi masing-masing. Masih sedikit dari Instansi penanaman modal Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- d. Instansi teknis provinsi dan Kabupaten/Kota belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil rapat taskforce. Tim Taskforce belum melakukan kunjungan lapangan.
- e. Tenaga evaluasi LKPM masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Demikian pula kendaraan operasional yang mampu beroperasi di segala medan belum tersedia.
- f. Kapasitas tim pemantauan masih belum memadai.

Solusi Pengendalian Penanaman Modal:

- a. Perlu adanya tambahan tenaga evaluasi LKPM untuk melakukan verifikasi atas LKPM yang diterima dengan mengoptimalkan SDM yang ada.
- b. Perlu sistem elektronik input data LKPM yang mudah dipakai petugas untuk mempercepat dan memperkecil kesalahan *database*.
- c. Perlu adanya tambahan kendaraan yang sesuai yang bisa masuk ke lokasi proyek terutama untuk proyek perkebunan dan pertambangan.
- d. Menegur perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM melalui Surat Teguran dan perlu adanya sanksi sesuai ketentuan.
- e. Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat, dan setiap perusahaan yang berinvestasi di Aceh agar membuka kantor di Aceh.
- f. Perlu diberi pembinaan kepada perusahaan agar menyampaikan kewajibannya untuk mengirimkan LKPM secara berkesinambungan dan benar sesuai ketentuan.
- g. Kuantitas dan kualitas tim verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal belum memadai.

- h. Perlu digalakkan investasi yang padat karya (lebih banyak menggunakan tenaga kerja), sehingga lebih banyak lapangan kerja baru yang tersedia untuk menurunkan tingkat pengangguran.
- i. Kualitas pemantauan perlu ditingkatkan dengan pembinaan kepada aparaturnya tenaga pemantauan realisasi penanaman modal provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j. Diharapkan perusahaan dapat melaporkan permasalahan yang dihadapi dan realisasi importasi mesin, sehingga menjadi bahan dasar dalam melakukan pengawasan.
- k. Pembinaan kepada perusahaan harus terus dilakukan, dan diharapkan perusahaan dapat mengisi sendiri LKPM melalui SPIPSE.
- l. Rapat koordinasi harus dihadiri oleh pengambil kebijakan, baik dari instansi terkait maupun dari perusahaan agar pengambilan kebijakan dapat segera diambil untuk menjadi solusi bagi masalah yang sedang dihadapi.
- m. Perlu peningkatan kerjasama, konsolidasi dengan pemerintah pusat dan daerah mengenai data dan informasi realisasi investasi yang disampaikan perusahaan.
- n. Perlu meningkatkan sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal bagi PDKPM dan instansi teknis Kabupaten/Kota.
- o. Tim Taskforce perlu turun ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang dihadapi perusahaan dan masyarakat setempat.
- p. Publikasi tentang LKPM dapat dilakukan setiap triwulan dengan memasukkan jumlah perusahaan yang belum menyampaikan LKPM dan yang tidak aktif.

Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan realisasi investasi asing dan domestik dengan menyederhanakan prosedur perizinan dan memperkuat kelembagaan DPMPTSP. Demikian pula pengembangan agroindustri, infrastruktur pelabuhan dan jalan tembus, serta pengembangan pariwisata menjadi prioritas penanganan yang memerlukan dukungan segenap lapisan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat mendukung program prioritas pemerintah pusat melalui sektor listrik, infrastruktur, dan kemaritiman. Kegiatan-kegiatan penanaman modal diharapkan dapat

membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh.

Sasaran Strategis II: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu
2. Monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan ke kabupaten/kota
3. Sosialisasi dan pembinaan perizinan dan non perizinan
4. Bimtek bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A
5. Rapat kerja pelayanan terpadu satu pintu
6. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A
7. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B
8. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan
9. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Tingkat Capaian	Kategori
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	87,50	Tahap I: 83,79 Tahap II: 84,79 Jumlah:84,29	96,33%	Baik
Rata-rata tingkat capaian				96,33%	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan*” yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **96,33%** atau dengan kategori **Baik**.

Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pengukuran 1 (satu) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

→ **Indikator Kinerja “*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan*” yang ditargetkan 87,50 dapat direalisasi sebanyak: Tahap I: 83,79 dan Tahap II: 84,79 dengan tingkat capaian 96,33% atau kategori Baik.**

Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2019 dilakukan dengan mengedarkan 308 (tiga ratus delapan) kuesioner kepada responden (pengguna layanan). Responden yang disurvei adalah para pengguna layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang sedang atau pernah (paling lama dua bulan terakhir) mendapat pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang dipilih secara random. Data yang dikumpulkan adalah data primer, yaitu diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Berdasarkan kuesioner yang disepakati dan dirumuskan 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

- a. Persyaratan pelayanan
- b. Prosedur pelayanan
- c. Waktu penyelesaian
- d. Biaya/tarif
- e. Produk layanan
- f. Kompetensi pelaksana
- g. Perilaku pelaksana
- h. Maklumat pelayanan
- i. Penanganan pengaduan

Tabel 3.4 Nilai Rata-rata (NRR) dan Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) 9 Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	TKM
1	Persyaratan	3,31	82,63
2	Prosedur	3,29	82,14
3	Waktu Pelayanan	3,05	76,14
4	Biaya/tariff	3,92	97,89
5	Produk layanan	3,27	81,82
6	Kompetensi pelaksana	3,29	82,31
7	Perilaku pelaksana	3,41	85,15
8	Maklumat pelayan	3,65	91,23
9	Penanganan pengaduan	3,66	91,56

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval TKM **3,43 atau Sangat Baik** merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan. Nilai Rata-Rata semua unsur sudah lebih dari 3,0 (rata-rata 3,43) hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut pada umumnya baik dan puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut.

Berdasarkan pengukuran terhadap 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM): Tahap I: 83,79 dan Tahap II: 84,79 yaitu berkisar diantara 81,26-100, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu **pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK**. Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan angka adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Interval TKM	Nilai Interval Konversi TKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00-1,75	25,00-43,75k	D	TIDAK BAIK
1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK
2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK
3,26-4,00	81,26-100,00	A	SANGAT BAIK

B. Realisasi Anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh melaksanakan 7 (tujuh) program utama pada Tahun Anggaran 2019 dengan dukungan berbagai kegiatan. Ini merupakan bagian dari pencapaian target Rencana Strategis 2017-2022. Beberapa kegiatan tidak dianggarkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan bidang penanaman modal pada tahun kedua RPJM Aceh 2017-2022 ini.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh telah berupaya menggunakannya seefektif dan efisien mungkin. Pagu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.58.229.007.168. Sedangkan realisasinya per 31 Desember 2019 adalah Rp.53.889.450.693 atau 92,55% dari pagu anggaran. Kinerja ini dinilai oleh Tim Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA sebagai prestasi yang sangat bagus (kategori hijau). Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Pada tabel 3.6 menunjukkan realisasi anggaran belanja DPMPTSP Aceh Tahun 2018.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Belanja DPMPTSP Aceh Tahun 2019

NO.	Uraiang	ANGGARAN (Rp)	Realisasi	%
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)
BELANJA				
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.655.133.115	15.586.204.016	93,58
II	BELANJA LANGSUNG	41.573.874.053	38.303.246.677	92,13
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.944.115.757	3.347.363.754	84,87
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.682.194.066	24.133.762.484	97,78
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	392.446.140	382.196.140	97,39
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	407.000.000	173.618.170	97,39
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	9.446.524.190	7.761.644.666	82,16
6	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	2.314.054.200	2.156.314.491	93,18
7	Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi	387.539.700	348.346.972	89,87
	TOTAL	58.229.007.168	53.889.450.693	92,55

Berdasarkan komposisi Anggaran Belanja DPMPTSP Aceh Tahun 2019 yang berjumlah Rp. 58.229.007.168 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.16.655.133.115 dengan realisasi sebesar Rp. 15.586.204.016 dan belanja Langsung sebesar Rp. 41.573.874.053 dengan realisasi sebesar Rp. 38.303.246.677

Perkembangan dan realisasi APBA serta persentase daya serap anggaran setiap tahun tidak sama, namun rata-rata realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun mencapai 91,54% secara rinci sebagaimana tertera dalam tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7 Jumlah dan Realisasi APBA dalam kurun waktu 2015-2019

No.	Tahun	APBA		%
		Jumlah	Realisasi	
1.	2015	16.325.161.443	15.831.570.407	96,98
2.	2016	16.246.441.008	15.402.262.613	94,80
3.	2017	30.754.308.494	27.926.479.293	90,81
4.	2018	34.429.973.088	27.979.730.159	81,27
5.	2019	58.229.007.168	53.889.450.693	92,55

Pada akhir tahun 2018 terjadi penurunan penyerapan anggaran dikarenakan adanya perubahan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2017 tentang pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, sehingga anggaran tidak terealisasi semua. Namun secara keseluruhan tingkat capaian penyerapan anggaran di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja DPMPTSP Aceh menjadi lebih efisien dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal, sejalan dengan perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang berbasis pada kinerja.

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh berhasil mencapai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,84 dalam pencapaian nilai realisasi investasi tahun 2019 melalui program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan capaian target 105,67 % dari target yang ditetapkan dan penyerapan anggaran 82,16%.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintah yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

sehingga terjadinya efisiensi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang \geq 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal	Jumlah nilai realisasi investasi	105,67	82,16	17,84

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi DPMPTSP Aceh Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2019), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir renstra. Secara umum, Nampak bahwa kinerja DPMPTSP Aceh pada tahun 2019 adalah baik, karena terjadi kenaikan dan 1 indikator memenuhi kriteria sangat baik, yaitu jumlah nilai realisasi investasi yang melebihi target sebanyak 105,67% dan jumlah rasio tenaga kerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 1:11 menjadi 1:29. IKM juga diperoleh nilai yang sangat baik yaitu berkisar diantara 81,26-100, maka kinerja unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPMPTSP Aceh untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pengembangan investasi di Aceh. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan, khususnya dalam renstra dan Renja Tahun 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh antara lain:

1. Harmonisasi regulasi perizinan dan nonperizinan
2. Peningkatan koordinasi antar lembaga dan lintas sektoral
3. Mengembangkan dan memanfaatkan Online Single Submission dalam proses perizinan dan nonperizinan
4. Mendorong pengembangan kawasan – kawasan industry baru
5. Promosi penanaman modal yang difokuskan pada detailed planed dengan berbagai metode
6. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal

Namun demikian beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja DPMPTSP Aceh ke depan. Pertama walaupun IKU telah mencapai target yang baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama Nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan penurunan ketimpangan (baik antar wilayah maupun pendapatan), kualitas lingkungan

dan penegakan tata ruang, peran DPMPTSP Aceh diperlukan untuk memastikan fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Bagi instansi di lingkungan DPMPTSP Aceh, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

**TABEL PENGUKURAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya jumlah penanaman modal	- Jumlah investor berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA)	240	670 Perusahaan	17 perusahaan	2,54%	1.159 perusahaan	1,47%
		- Jumlah daya serap tenaga kerja	11	65	29	44,62%	80	36,25%
		- Jumlah nilai realisasi investasi	1,3 T	5,5 T	5,8 T	105,67%	7,3 T	79,45%
2.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan	- Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	85,57	87,50	84,29	96,33	89,50	94,18%